

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 2, Nomor 9, Oktober 2024, P. 716-725
Licenced by CC BY-SA 4.0
E-ISSN: 2986-6340
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13917916>

Indikasi Politik Identitas Muhaimin Iskandar dan Keraguan Terhadap Nahdatul Ulama Bila Tidak Memilih Pasangan AMIN di Pilpres 2024

Rega Imam Buchori¹

¹Universitas Padjadjaran, Jatinangor, Indonesia

*Email korespondensi: rega21001@mail.unpad.ac.id

Abstrak

Artikel ini menggali indikasi politik identitas yang dilakukan oleh Muhaimin Iskandar, khususnya dalam upaya untuk memenangkan hati warga Nahdlatul Ulama (NU) untuk Pilpres 2024. Sebagai calon wakil presiden Anies Baswedan (AMIN), Muhaimin menegaskan bahwa setiap warga NU yang tidak mendukung pasangan ini tampak meragukan kesetiaan mereka kepada organisasi tersebut. Pernyataan ini menimbulkan keraguan dan potensi perpecahan di kalangan warga NU, terutama karena terdapat pejabat publik yang merupakan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muslimat Nahdlatul Ulama dan menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024 mendukung pasangan Prabowo-Gibran, yaitu Khofifah Indar Parawansa. Penelitian ini akan mengkaji potensi, berupa konsekuensi bagi organisasi NU jika keraguan ini tidak ditangani dengan tepat, serta bagaimana politik identitas berbasis NU dapat memengaruhi keputusan yang dibuat oleh para pemilih NU. Artikel ini menekankan pentingnya menjaga integritas NU dan peran moderasi dalam menghadapi polarisasi politik dan penggunaan agama dalam kontestasi politik, serta membahas bahaya politisasi agama bagi demokrasi dan persatuan sosial Indonesia.

Kata kunci: *Politik Identitas, Muhaimin Iskandar, Nahdlatul Ulama*

Abstract

This article explores indications of identity politics carried out by Muhaimin Iskandar, especially in an effort to win the hearts of Nahdlatul Ulama (NU) members for the 2024 Presidential Election. As Anies Baswedan's (AMIN) vice presidential candidate, Muhaimin emphasized that every NU member who does not support this pair seems to doubt their loyalty to the organization. This statement raises doubts and potential divisions among NU members, especially because there is a public official who is the General Chairperson of the Central Board (PP) of Muslimat Nahdlatul Ulama and serves as the Governor of East Java for the 2019-2024 period who supports the Prabowo-Gibran pair, namely Khofifah Indar Parawansa. This study will examine the potential, in the form of consequences for the NU organization if these doubts are not handled properly, as well as how NU-based identity politics can influence decisions made by NU voters. This article emphasizes the importance of maintaining NU's integrity and the role of moderation in dealing with political polarization and the use of religion in political contestation, and discusses the dangers of politicizing religion for democracy and social unity in Indonesia.

Keywords: *Identity Politics, Muhaimin Iskandar, Nahdlatul Ulama*

Article Info

Received date: 15 September 2024

Revised date: 25 September 2024

Accepted date: 05 Oktober 2024

PENDAHULUAN

Di Indonesia, pemilihan umum (Pemilu) menjadi puncak agenda demokrasi yang selalu penuh dengan euforia. Tujuan utama pemilihan umum, yang berlangsung setiap lima tahun sesuai dengan undang-undang yang mengatur setiap aspek pelaksanaannya, adalah untuk memilih pemimpin negara dan wakil rakyat secara adil dan terbuka. Regulasi yang mengatur pemilihan umum di Indonesia telah diatur pada Undang-undang (UU) nomor 7 tahun 2017 untuk memberikan arahan tentang langkah-langkah, prasyarat, dan pelaksanaan proses pemilihan umum. Pemilihan umum di Indonesia bukan hanya tentang memilih pemimpin, namun juga berfungsi sebagai jendela menuju kebebasan politik dan partisipasi aktif rakyat dalam menentukan arah nasib negara.

Pemilihan umum adalah prosedur paling mendasar dalam konteks demokrasi. Salah satu pilar utama yang mendukung sistem demokrasi Indonesia adalah proses pemilihan umum, yang memberikan warga negara kesempatan untuk menggunakan hak pilih mereka dan memilih pemimpin mereka sendiri. Hal tersebut didukung bahwa pemilihan umum menjadi pusat perhatian dalam definisi negara demokrasi ketika pandangan Schumpeterian tentang demokrasi sebagai "metode politik" yang

mendominasi teorisasi demokrasi. Selanjutnya, demokrasi didefinisikan oleh Przeworski dan rekan-rekannya dalam (Diamond, 2003) sebagai "rezim yang menyelenggarakan pemilihan umum untuk mengisi jabatan-jabatan pemerintahan" (tunduk pada kualifikasi bahwa persaingan sejati memerlukan keberadaan oposisi dengan peluang yang sah untuk memenangkan jabatan publik dan pemilihan pemimpin cabang legislatif dan eksekutif). Sedangkan menurut Dahl (2001) mencatat bahwa pemilihan umum adalah pejabat terpilih dan pemilihan umum yang bebas, adil, dan berkala, terhubung dengan dua dari enam fitur lembaga politik yang dibutuhkan oleh demokrasi berskala besar. Indonesia adalah negara dengan populasi besar dan wilayah yang luas, sehingga pemilihan umum ini terus-menerus menarik perhatian dari seluruh dunia. Pemilihan umum adalah cara yang efektif untuk mengukur seberapa baik suatu masyarakat mengetahui dan menggunakan hak-hak demokrasinya, terutama dalam hal memilih pemimpinnya. Perbedaan pandangan dan preferensi merupakan hal yang lumrah dalam demokrasi, tetapi perbedaan tersebut harus tetap berada dalam batasan hukum.

Keberagaman Indonesia merupakan salah satu ciri khasnya. Dengan lebih dari 270 juta penduduk, negara ini merupakan rumah bagi berbagai suku, agama, etnis, dan budaya yang hidup berdampingan. Keberagaman ini dapat menghadirkan peluang sekaligus tantangan dalam lingkungan politik. Pemilu sering kali memunculkan politik identitas, terutama ketika kampanye menyoroti unsur-unsur identitas bawaan seperti ras, agama, atau suku. Menurut Mansurni Abadi (2023), jika moralitas politik diutamakan, penggunaan identitas dalam politik tidak selalu buruk. Namun, jika hal ini dilanggar dapat memunculkan masalah seperti keresahan masyarakat akibat penggunaan identitas demi memperoleh elektoral semata. Berdasarkan laporan Supratikno (2022), politik identitas yang tidak terkendali memiliki dampak negatif yang jelas, seperti pertikaian SARA, radikalisme dan fundamentalisme agama, serta manuver politik yang sarat dengan ujaran kebencian yang ditujukan kepada pihak lawan. Selain itu, Akbar Faisal (2022) menegaskan bahwa penanganan politik identitas yang tidak tepat dapat menyebabkan diskriminasi, fragmentasi masyarakat, dan manipulasi politik. Di dunia modern, politik identitas telah banyak mendapat perhatian dan diskusi, terutama sejak Huntington menulis buku tahun 1993 yang berjudul "*Clash of Civilizations?*".

Berdasarkan data dari BPS, terdapat lebih dari 85% penduduk Indonesia mengidentifikasi diri sebagai Muslim, yang menjadikan agama Islam adalah mayoritas. Indonesia adalah rumah bagi populasi Muslim terbesar di dunia, dan karenanya, Islam penting bagi banyak aspek kehidupan Indonesia, termasuk politik. Dengan jutaan pengikut yang tersebar di seluruh wilayah, Nahdlatul Ulama (NU) adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia. NU terkenal tidak hanya sebagai lembaga keagamaan tetapi juga sebagai kekuatan yang kuat dalam politik. Setiap pemilihan, kandidat yang berharap untuk mengamankan suara mayoritas berfokus terutama pada perolehan dukungan dari NU dan kelompok Islam lainnya. Memperoleh dukungan mayoritas sering dianggap sebagai faktor kunci dalam memenangkan pemilihan, khususnya di antara kelompok-kelompok agama. Organisasi seperti NU, yang memiliki basis massa yang cukup besar dan terorganisasi dengan baik, mampu memobilisasi banyak dukungan dan memiliki dampak besar pada hasil pemilihan.

Kontestasi dalam Pemilu 2024 telah diikuti oleh tiga pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Pada pasangan calon nomor urut satu, Anies Baswedan di calonkan sebagai calon Presiden dan Muhaimin Iskandar sebagai calon Wakil Presiden, yang juga dikenal disapa Cak Imin, merupakan salah satu politisi yang memiliki ikatan kuat dengan Nahdlatul Ulama. Namun, meskipun Cak Imin telah dicalonkan sebagai salah satu kandidat utama dalam Pemilu, terdapat pertanyaan di kalangan NU tentang apakah mereka akan sepenuhnya mendukungnya. Mengingat Cak Imin merupakan salah satu individu yang sering dikaitkan dengan identitas politik berbasis agama, khususnya Islam, hal ini menjadi isu yang signifikan. Di satu sisi, Cak Imin memiliki keunggulan taktis dalam memenangkan hati kaum Muslim tradisional berkat afiliasinya dengan NU. Di sisi lain, penggunaan identitas dalam politik yang berlebihan terkadang diketahui dapat memperburuk perpecahan internal di dalam NU dan menimbulkan resistensi dari pemilih yang lebih moderat.

Menarik untuk melihat bagaimana kandidat seperti Cak Imin, menggunakan identitas dalam politik di situasi ini dan bagaimana hal itu dapat memengaruhi dukungan Nahdlatul Ulama. Pilihan NU, salah satu kelompok Islam terbesar dan terkuat, untuk mendukung atau tidak mendukung seorang kandidat dapat berdampak signifikan pada hasil pemilu. Mengingat semakin diakuinya bahaya yang terkait dengan politik identitas, NU perlu berhati-hati dalam mengevaluasi tindakan politik para

pemimpinnya untuk menghindari keterlibatan dalam polarisasi yang dapat berpotensi memecah belah masyarakat.

Karena menggambarkan potensi konflik antara tujuan menjaga persatuan nasional dalam menghadapi keragaman dan representasi politik berdasarkan identitas agama, subjek ini penting dan relevan untuk dibicarakan. Untuk menentukan apakah politik identitas akan tetap dominan atau apakah pemilih dan partai politik akan lebih menekankan pada kebijakan yang inklusif dan berbasis program, pemilu 2024 akan menjadi sangat penting. Mengingat skeptisisme yang diungkapkan oleh sejumlah kelompok atas dukungan Nahdlatul Ulama, penanganan masalah ini secara bijaksana akan berdampak signifikan pada politik Indonesia ke depannya.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*library research*), yang berkonsentrasi pada perolehan data dari buku, jurnal, dan situs resmi pemerintah untuk mendukung informasi yang diperlukan oleh peneliti dalam penelitian ini. Studi literatur menurut Rosyidhana (2014:3) dalam (Rusmawan 2019:104) adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca sumber-sumber tertulis yang telah diterbitkan sebelumnya, seperti buku atau literatur yang memberikan penjelasan tentang landasan teori. Menurut Dewi dalam Rusmawan (2019:104), sama dengan pengumpulan data dan informasi dengan cara menggali ilmu atau pengetahuan dari sumber-sumber seperti buku, karya tulis, dan berbagai sumber lain yang berkaitan dengan objek kajian. Berdasarkan penjelasan tersebut sehingga melibatkan untuk membaca, memahami, dan mengevaluasi analisis individu sambil mempertimbangkan teori-teori sebelumnya yang berkaitan dengan tema atau subjek tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Nahdlatul Ulama dalam Ranah Politik

Organisasi masyarakat Islam utama di Indonesia merupakan Nahdlatul Ulama (NU), yang didirikan pada tahun 1926 oleh para ulama, termasuk Hasyim Asy'ari, selama puncak gerakan pembaruan Islam. NU didirikan sebagai wadah bagi para ulama dan kelompok Muslim tradisional Indonesia untuk menegakkan dan memajukan ajaran Islam Sunni yang berlandaskan pada filosofi *Ahlussunnah wal Jama'ah* (Aswaja). Seiring dengan pertumbuhannya, NU muncul sebagai salah satu pilar yang menopang perjalanan politik, sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat Indonesia. Pembentukan karakter bangsa sangat terbantu oleh keberadaan NU, khususnya dalam mempromosikan moderasi Islam dan menjaga persatuan dalam menghadapi keberagaman.

Hubungan antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terkadang disalahpahami, meskipun NU memiliki dampak sosial yang signifikan. Banyak pihak mengira bahwa PBNU dan PKB merupakan dua entitas yang saling terikat secara struktural dan formal. Secara hukum dan fungsional, kedua lembaga ini sebenarnya merupakan entitas yang berbeda. PKB merupakan partai politik yang berkonsentrasi pada aktivitas politik dan legislatif, sedangkan PBNU merupakan organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang keagamaan dan sosial.

Peraturan yang mengatur PBNU dan PKB menunjukkan perbedaan mendasar di antara keduanya. Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) yang mengatur PBNU memberikan hak hukum bagi organisasi ini untuk terlibat dalam kegiatan sosial keagamaan, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat. Sementara itu, PKB terikat oleh aturan yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Partai Politik yang mengatur peran dan tujuan partai politik dalam proses politik, termasuk perumusan kebijakan, pemilihan umum, dan kegiatan legislatif lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun keduanya memiliki dampak terhadap kehidupan masyarakat, PBNU dan PKB memiliki peran yang sangat berbeda dan tidak dapat dibandingkan.

Salah satu kesalahpahaman umum yang terjadi di masyarakat adalah bahwa karena sejarah yang sama, NU dan PKB dianggap memiliki hubungan struktural yang kuat. Memang benar bahwa NU terlibat dalam pendirian PKB di masa lalu. Para tokoh NU, termasuk Gus Dur yang saat itu juga menjabat sebagai Ketua Umum PBNU, mendirikan partai ini pada 23 Juli 1998 di Jakarta. Dengan berakhirnya era Orde Baru dan dimulainya era reformasi di Indonesia, PKB didirikan dengan tujuan untuk mewakili kepentingan warga Nahdliyyin di ranah politik. Namun, meskipun para petinggi NU mendirikan PKB, tidak ada hubungan formal antara keduanya. PKB berfungsi sebagai partai politik

yang berdiri sendiri dan terpisah dari sistem pemerintahan NU. Akibatnya, keputusan politik PKB maupun PBNU tidak selalu sejalan dengan pendapat atau kebijakan mereka.

Kebutuhan akan wakil politik yang dapat mewakili kepentingan warga NU di ranah politik nasional mendorong lahirnya PKB saat itu, dengan bantuan para Kiai NU. Meskipun demikian, PKB telah tumbuh menjadi partai dengan dinamika internal yang khas meskipun memiliki ikatan historis yang erat. Meskipun NU sebagai organisasi tidak terlibat secara formal dalam operasi politik yang sebenarnya, para Kiai dan tokoh NU mungkin memiliki pengaruh dalam PKB. Hal ini juga sesuai dengan prinsip NU yang lebih menekankan pada peningkatan peran sosial keagamaan dan kemasyarakatan daripada partisipasi aktif dalam politik.

Meskipun memiliki kesamaan pendiri dan hubungan sejarah yang erat, PBNU dan PKB merupakan organisasi yang berbeda dengan misi dan aturan yang berbeda pula. PKB merupakan partai politik yang berbadan hukum, sedangkan PBNU merupakan organisasi kemasyarakatan yang berkonsentrasi pada kegiatan sosial dan keagamaan. Meskipun memiliki latar belakang sejarah yang sama, baik secara hukum maupun arsitektur berdiri sendiri dan menjalankan peran yang berbeda sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Profil Politik Muhaimin Iskandar dan Hubungannya dengan Nahdatul Ulama

Salah satu tokoh politik berpengaruh di Indonesia adalah Muhaimin Iskandar, yang juga dikenal sebagai Cak Imin, dan sangat erat kaitannya dengan Nahdlatul Ulama (NU). Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin telah menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam dinamika politik nasional. Secara khusus, beliau telah berperan dalam pembentukan dan pengelolaan hubungan antara partai politiknya dan organisasi NU. Muhaimin lahir pada tanggal 24 September 1966, di Jombang, Jawa Timur, dan berlatar belakang dari keluarga yang memiliki akar yang kuat dalam lingkungan NU sepanjang hidupnya. Hal tersebut dapat ditunjukkan melalui kakek Muhaimin adalah KH Bisri Syansuri yang merupakan salah satu pendiri NU. Oleh karena itu, Muhaimin tumbuh dengan pemahaman yang mendalam tentang tradisi keagamaan NU serta dampak politik yang dimiliki organisasi tersebut dalam tatanan nasional. Awal karier politik Muhaimin dapat ditelusuri dari keterlibatannya dalam sejumlah organisasi kepemudaan di lingkungan NU, seperti Gerakan Pemuda Ansor. Pada tahun 1998, beliau juga menjadi anggota pengurus PKB. PKB didirikan sebagai wadah politik NU pascareformasi, dengan tujuan memperjuangkan kepentingan politik warga Nahdliyin dalam kerangka sistem demokrasi di Indonesia. Sejak awal, Muhaimin telah menempatkan dirinya sebagai salah satu kader NU terpenting yang berperan dalam mengoordinasikan aspirasi politik kaum santri ke ranah partai politik. Keberhasilannya memimpin PKB dan bertahan dalam berbagai dinamika politik internal partai, termasuk krisis internal yang mengguncang PKB, turut memperkuat posisi tersebut.

Muhaimin, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum PKB, kerap kali menegaskan posisinya sebagai "kader NU sejati". Klaim tersebut dilontarkan Muhaimin untuk melegitimasi posisinya di hadapan warga NU dan sebagai simbol bahwa dirinya memiliki ikatan historis dan budaya yang tak terpisahkan dengan NU. Pernyataan tersebut kerap kali digunakan Muhaimin sebagai senjata politik, khususnya dalam upaya untuk menggalang dukungan dari Nahdliyin. Pada Pemilu 2024, klaim sebagai kader asli NU kembali dilontarkan Muhaimin, khususnya saat maju sebagai calon wakil presiden berpasangan dengan Anies Baswedan dan dirinya (AMIN). Dalam situasi tersebut, beliau menegaskan bahwa para pendukung NU harus memilihnya, karena identitasnya sebagai bagian dari keluarga NU. Hal ini mengindikasikan upaya Muhaimin untuk memanfaatkan sentimen identitas keagamaan dalam menggalang dukungan politik.

Singkatnya, profil politik Muhaimin Iskandar sangat dipengaruhi oleh keterkaitannya dengan NU. Beliau berhasil memanfaatkan sejarah kultural dan historis ini untuk membangun karier politiknya dan memobilisasi dukungan, tetapi strategi ini juga membawa kendala yang sangat besar, terutama ketika klaim identitas ini berhadapan dengan keberagaman ide politik di dalam NU sendiri. Taktik ini, meskipun berpotensi meningkatkan dukungan jangka pendek, tetap harus diimbangi dengan upaya menjaga kohesi dan persatuan warga NU agar tidak terjebak dalam disintegrasi politik berbasis identitas yang merusak.

Politik Identitas dan Identitas Politik

Pembahasan mengenai politik identitas dan identitas politik menjadi semakin penting untuk dipahami dalam situasi politik Indonesia, khususnya dalam situasi Pilpres 2024 yang telah

dilaksanakan dan Pilkada 2024 mendatang. Sebab, kedua gagasan ini memiliki dampak yang besar terhadap integrasi sosial dan dinamika politik. Perlu digarisbawahi bahwa identitas politik tidak sama dengan politik identitas. Identitas politik lebih merujuk pada identitas yang membedakan seseorang atau sekelompok orang dengan yang lain. Namun, politik identitas merujuk pada pengejaran kepemilikan identitas untuk menciptakan pemisahan berdasarkan identitas ras, etnis, budaya, atau agama. Akibatnya, hubungan antara politik identitas dan identitas politik menjadi lebih luas jika mempertimbangkan perubahan keyakinan, tindakan, dan motivasi politik. Mahfud MD mendefinisikan identitas politik sebagai identitas yang dikaitkan dengan seseorang atau kelompok berdasarkan kesetiaan atau ideologi politik tertentu. Hal ini menunjukkan preferensi politik seseorang, sebagai contoh hubungan dengan partai seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Proses demokrasi yang kuat, di mana orang bebas membuat keputusan berdasarkan pandangan dan prinsip politik mereka, memungkinkan pembentukan identitas politik yang sah. Identitas politik, dengan demikian, merupakan komponen penting dari proses politik yang demokratis karena memberi orang fleksibilitas untuk mendukung kandidat atau partai politik yang dirasa paling sesuai dengan kepentingan mereka.

Disisi lain, politik identitas cenderung kontroversial dan memiliki makna yang berbeda. Politik identitas adalah praktik memobilisasi dukungan secara eksklusif dengan menarik identitas utama, seperti agama, suku, atau etnis, yang sering kali mengorbankan integrasi sosial dan kerukunan masyarakat. Mahfud MD menyatakan bahwa politik identitas lebih berisiko karena menggunakan perbedaan sebagai senjata politik untuk mengecualikan atau meminggirkan kelompok lain. Ketika suatu kelompok agama atau etnis menggunakan identitas mereka untuk menyudutkan kelompok lain, itu adalah contoh politik identitas negatif dan dapat menyebabkan pertikaian dan polarisasi masyarakat. Hal tersebut serupa dengan politik identitas di Amerika Serikat yang mengacu pada hubungan telah lama terjalin antara kelompok agama dan negara yang diringkas dalam kekuatan politik dan moralitas, dan awalnya dipicu oleh keinginan separatis. Begitu juga di Inggris dan Eropa Barat, politik identitas merupakan produk sampingan dari konflik politik yang diakibatkan oleh konfrontasi budaya antara agama minoritas dan imigran (Kenny, 2004:3).

Agama merupakan budaya manusia yang dapat dipraktikkan oleh para pengikutnya dengan berbagai cara, termasuk fundamentalisme, sekuler, toleran ataupun bentuk aliran menyimpang. Fundamentalisme telah menyatakan untuk menentang modernitas dan tradisionalisme guna menghidupkan kembali identitas budaya tradisional melalui perebutan kekuasaan politik dan pembentukan dominasi absolut (Meyer, 2004: 13).

Dalam hal ini, Muhaimin Iskandar memanfaatkan politik identitas dengan menekankan bahwa dirinya adalah kader asli NU dan menghubungkan identitas ke NU lainnya dengan dukungan terhadap pasangan Anies Baswedan dan dirinya (AMIN). Pernyataan Muhaimin bahwa warga NU yang tidak mendukung pasangan AMIN bisa diragukan ke NU lainnya adalah bentuk nyata dari politik identitas. Muhaimin Iskandar menggunakan sentimen keagamaan untuk membangun dukungan politik berdasarkan identitas NU, namun pendekatan ini dapat memicu perpecahan di kalangan warga NU, karena tidak semua anggota NU merasa terikat oleh narasi tersebut.

Perbedaan antara identitas politik dan politik identitas dalam penelitian ini tampak jelas. Identitas politik Muhaimin sebagai kader NU adalah sah dan wajar dalam dinamika politik demokratis, di mana beliau berhak menyampaikan visi dan misinya sebagai bagian dari NU kepada para pemilih. Namun, ketika identitas tersebut digunakan untuk memaksa dukungan politik berdasarkan agama, narasi ini beralih menjadi politik identitas yang dapat merusak. Penggunaan agama secara berlebihan dalam kampanye politik dapat mempersempit ruang dialog yang rasional dan mengarahkan pemilih untuk memilih berdasarkan loyalitas agama, bukan berdasarkan penilaian yang matang terhadap program atau visi kandidat.

Kontroversi dan Respon terhadap Pernyataan Muhaimin Iskandar

Pernyataan Muhaimin Iskandar yang meragukan ke NU an warga Nahdlatul Ulama (NU) yang tidak mendukung pasangan Anies Baswedan dan dirinya (AMIN) pada Pilpres 2024 menuai sejumlah kontroversi. Muhaimin yang dikenal sebagai salah satu kader senior NU itu terang-terangan meragukan loyalitas terhadap warga NU yang memilih calon lain. Pernyataannya yang dilontarkan dalam berbagai kesempatan di muka umum itu seolah mengisyaratkan bahwa identitas keagamaan seseorang dipertanyakan jika tidak sepihak dengannya. Reaksi atas pernyataan itu muncul dari

berbagai kalangan, baik dari internal NU maupun masyarakat luas, dengan sebagian besar menanggapi dengan kritis dan skeptis terhadap narasi yang diusung Muhaimin.

Dari internal NU sendiri, sejumlah tokoh dan warga Nahdliyin merasa risau dengan anggapan bahwa ke NU an mereka dinilai dari keputusan politik. Sebagai organisasi keagamaan yang mendasarkan keyakinannya pada moderasi dan pluralisme, banyak warga NU menolak narasi bahwa identitas mereka sebagai bagian dari NU harus sejalan dengan keputusan politik tertentu. Tokoh penting seperti Khofifah Indar Parawansa, yang juga menduduki peran penting di NU, secara implisit membantah pernyataan Muhaimin dengan menegaskan bahwa dukungan politik tidak harus dikaitkan dengan satu tokoh atau satu pasangan calon tertentu. Hal ini menggambarkan beragamnya pandangan politik warga NU yang tidak dapat disederhanakan atau direduksi menjadi satu narasi tunggal tentang "keaslian" identitas keagamaan berdasarkan keputusan politik.

Di sisi lain, tanggapan dari masyarakat umum, terutama di luar konteks NU, juga cenderung mengkritisi pernyataan Muhaimin. Banyak yang menilai bahwa pernyataan tersebut berpotensi memecah belah masyarakat berdasarkan afiliasi agama dan merusak kohesi sosial. Di era di mana politik identitas digunakan sebagai alat mobilisasi, pernyataan Muhaimin dipandang sebagai bentuk manipulasi identitas keagamaan untuk meraih dukungan politik. Mengingat sejarah NU sebagai organisasi yang dibangun atas dasar cita-cita moderat dan inklusif, eksploitasi identitas agama sebagai instrumen politik bertentangan dengan semangat pluralisme yang selama ini diperjuangkan NU.

Analisis lebih lanjut atas pernyataan ini menunjukkan bahwa langkah Muhaimin dapat dimaknai sebagai taktik politik untuk memperkuat basis dukungan warga NU. Dengan menyatakan dirinya sebagai kader NU sejati, Muhaimin berupaya menegaskan posisinya sebagai representasi paling sejati dari cita-cita keagamaan NU. Dalam hal ini, pernyataan yang meragukan NU dari orang-orang yang tidak mendukung AMIN tampaknya ditujukan untuk menumbuhkan bentuk loyalitas politik yang didasarkan pada identitas agama. Teknik semacam ini sering digunakan dalam kampanye politik di mana tokoh atau partai bertujuan untuk merangkul pemilih melalui hubungan emosional dan budaya yang kuat, alih-alih berdasarkan agenda kebijakan yang rasional.

Namun, kekhawatiran penting yang muncul adalah apakah metode ini lebih bersifat manipulatif daripada representatif. Penggunaan identitas agama sebagai instrumen politik berpotensi mengasingkan sebagian besar orang yang merasa bahwa agama seharusnya tidak menjadi alat politik yang realistis. Dalam situasi ini, aktivitas Muhaimin dapat dimaknai sebagai upaya memanipulasi sentimen keagamaan warga NU demi keuntungan politik jangka pendek, meski berisiko menghancurkan integritas identitas keagamaan itu sendiri. Ketika identitas keagamaan dimanfaatkan sebagai pembatas antara "yang asli" dan "yang bukan asli", hal itu menciptakan garis pemisah yang berbahaya, tidak hanya di dalam kelompok NU, tetapi juga di lingkungan politik nasional yang lebih luas.

Secara keseluruhan, komentar Muhaimin Iskandar tidak hanya menimbulkan kemarahan, tetapi juga memicu perdebatan tentang sejauh mana identitas keagamaan dapat dimobilisasi untuk tujuan politik. Sementara sebagian orang menganggapnya sebagai alat politik yang sah untuk mengumpulkan dukungan, banyak yang lain melihatnya sebagai jenis manipulasi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keberagaman dan moderasi yang telah lama menjadi fondasi NU. Dalam latar belakang Pilpres 2024, narasi ini menggambarkan kesulitan yang dialami oleh para pemilih, terutama dari kalangan NU dalam menavigasi antara identitas keagamaan mereka dan penilaian politik yang rasional dan inklusif.

Peran Khofifah Indar Parawansa dan Pengaruhnya Terhadap Warga Nahdatul Ulama

Khofifah Indar Parawansa merupakan salah satu tokoh perempuan terkemuka di Indonesia, khususnya di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU) dan kancah politik nasional. Sebagai Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024 dan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muslimat NU, Khofifah sangat disenangi oleh warga NU, khususnya perempuan Nahdliyin yang dipengaruhinya melalui berbagai advokasi sosial dan inisiatif pemberdayaan. Khofifah dikenal mampu memobilisasi basis massa NU dalam skala besar, dan perannya sebagai gubernur telah meningkatkan pengaruhnya di Jawa Timur, salah satu benteng NU terbesar di Indonesia.

Ketika Khofifah mengumumkan akan mendukung Gibran Rakabuming dan Prabowo Subianto pada pemilu 2024, dinamika politik di kalangan warga NU menjadi lebih kompleks. Sedangkan, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang merupakan kader asli NU, maju bersama Anies

Baswedan dalam pasangan AMIN sebagai wakil presiden. Keputusan politik Khofifah yang berbeda dengan narasi Muhaimin menunjukkan adanya perbedaan pendapat di kalangan elite NU. Hal ini penting karena Khofifah merupakan tokoh kunci di NU dan memiliki pengaruh besar terhadap pendapat dan kecenderungan politik anggotanya, khususnya kaum Muslimat di NU, karena beliau sangat dihormati.

Keputusan politik Khofifah untuk mendukung pasangan Prabowo-Gibran menunjukkan bahwa warga NU tidak perlu menganut narasi politik identitas tunggal yang didorong oleh Muhaimin. Sementara Muhaimin berupaya untuk mendapatkan dukungan dengan menonjolkan identitas NU nya, Khofifah mengambil pendekatan berbeda yang mencerminkan pluralitas dan independensi politik masyarakat NU. Dukungan Khofifah terhadap Prabowo-Gibran juga menyoroti fakta bahwa identifikasi keagamaan dapat berubah secara dinamis sebagai respons terhadap lanskap dan kepentingan politik yang lebih luas, alih-alih terkait erat dengan keputusan politik tertentu.

Dalam hal politik identitas Muhaimin, Khofifah memiliki pengaruh besar terhadap para pendukung NU. Pilihan Khofifah untuk mendukung pasangan selain AMIN menunjukkan bahwa identitas agama tidak dapat dipaksakan menjadi instrumen politik yang seragam, khususnya di kalangan warga NU. Khofifah dipandang oleh banyak warga NU sebagai seorang moderat yang lebih mengutamakan akal sehat daripada penggunaan simbol-simbol agama untuk mendapatkan dukungan. Hal ini tentu saja memengaruhi cara warga NU menafsirkan narasi Muhaimin, yang menyatakan bahwa orang-orang yang memiliki pendapat politik yang berbeda tidak dapat begitu saja dianggap "bukan bagian dari NU."

Dalam hal ini, Khofifah sangat penting dalam mengimbangi narasi politik identitas Muhaimin. Pengaruh Khofifah yang luas menunjukkan bahwa keputusan politik yang dibuat oleh warga NU tidak harus dibatasi pada dikotomi sempit antara "NU asli" dan "bukan NU asli," seperti yang dikemukakan Muhaimin. Sebaliknya, beliau menekankan bahwa politik di antara warga NU dapat mewakili keberagaman dan pilihan pribadi dalam memilih keputusan berdasarkan faktor-faktor yang lebih kompleks, termasuk kualifikasi dan kebijakan kandidat.

Secara umum, warga NU yang mungkin merasa terkekang oleh narasi politik identitas Muhaimin memiliki perspektif politik alternatif berkat dukungan Khofifah terhadap Prabowo-Gibran dan keunggulannya di dalam organisasi tersebut. Dengan mendukung politik inklusif dan menghormati pluralitas dalam komunitas NU, pengaruh Khofifah, khususnya di kalangan perempuan Muslimat di NU dapat turut berkontribusi pada menjaga keseimbangan dalam diskursus politik yang lebih luas.

Konsekuensi Jangka Panjang terhadap Nahdatul Ulama dan Demokrasi Indonesia

Dalam masyarakat yang demokratis, penggunaan identitas politik adalah hal yang wajar dan dapat diterima. Identitas politik seseorang merupakan cerminan keterkaitannya dengan partai politik, kelompok ideologis, atau kelompok tertentu yang memperjuangkan kebijakan dan cita-cita politik tertentu. Identitas politik dalam kerangka Nahdatul Ulama (NU) sering dikaitkan dengan organisasi yang memiliki sejarah panjang atau hubungan dekat dengan NU, seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dipimpin Muhaimin Iskandar. Afiliasi politik seperti ini dapat membantu menciptakan persatuan dalam menyuarakan aspirasi politik yang berkaitan dengan nilai-nilai agama dan budaya NU. Namun, ketika politik identitas dilakukan secara berlebihan, seperti menciptakan perpecahan ras, etnis, atau agama diprioritaskan di atas perbedaan mendasar lainnya untuk mendapatkan dukungan politik, hasilnya bisa menjadi bencana. Politik identitas yang ekstrem memiliki kekuatan untuk menciptakan perpecahan dalam komunitas, bahkan komunitas besar seperti NU. Jika politik identitas didorong ke titik ekstrem, seperti menyatakan bahwa orang yang tidak mendukung pasangan calon tertentu bukan bagian dari kelompok NU "asli", seperti yang ditunjukkan dalam pernyataan Muhaimin Iskandar, hal ini dapat menyebabkan polarisasi internal yang parah.

Penggunaan politik identitas yang berlebihan pada akhirnya akan menyebabkan NU menjadi terfragmentasi. Narasi politik yang didasarkan pada klaim keaslian agama dapat menyebabkan masyarakat yang sebelumnya bersatu dalam cita-cita dan tradisi keagamaan terpecah menjadi faksi-faksi yang bersaing. Kohesivitas sosial yang selama ini menjadi kekuatan organisasi NU yang moderat akan sangat dirugikan oleh hal ini. Efek ini akan diperkuat jika perbedaan politik dianggap sebagai ancaman terhadap identitas bersama seseorang dan identifikasi agama menjadi satu-satunya pertimbangan dalam membuat keputusan. Dalam hal ini, dampak Muhaimin Iskandar yang

menggunakan tema-tema agama untuk memobilisasi massa NU dapat memperburuk perbedaan dalam kelompok NU, terutama jika pemimpin lain seperti Khofifah Indar Parawansa mengambil arah politik yang berbeda. Sebagai organisasi moderat yang mengedepankan pluralitas dan persatuan, NU berisiko kehilangan peran pentingnya dalam menjaga kedamaian sosial jika agenda politik identitas ini dijalankan. Tidak hanya itu, citra NU sebagai wadah toleransi dan moderasi dalam masyarakat Indonesia bisa rusak oleh narasi politik yang menekankan eksklusivitas agama. Selain berdampak buruk bagi NU secara keseluruhan, pertikaian internal di dalam organisasi tersebut berpotensi membuat NU kurang efektif sebagai penyeimbang dalam politik nasional.

Penerapan politik identitas yang berlebihan juga menjadi tantangan besar bagi demokrasi Indonesia. Bukan sekadar mobilisasi berdasarkan identitas kelompok, tetapi juga persaingan ide dan konsepsi berdasarkan program diperlukan untuk demokrasi yang sehat. Jika politik identitas diutamakan daripada perdebatan yang bermakna tentang kebijakan publik, masyarakat Indonesia akan semakin terpecah belah berdasarkan garis agama, etnis, atau golongan. Polarisasi berbasis identitas berpotensi memperparah ketegangan antarkelompok, memicu kekerasan politik dalam situasi yang parah, dan menggerogoti kepercayaan publik terhadap lembaga demokrasi.

Dampak yang lebih luas dari membiarkan politik identitas berkembang tanpa kendali adalah masyarakat Indonesia dapat terjerumus ke dalam politik sektarian, di mana perpecahan identitas lebih diutamakan daripada persatuan nasional. Nilai-nilai inklusi, kesetaraan, dan keadilan bagi semua warga negara akan terganggu, sehingga membahayakan stabilitas sosial dan merusak demokrasi. Dalam keadaan seperti ini, demokrasi Indonesia dapat terancam jika masyarakat negara ini semakin terpecah belah dan rentan terhadap manipulasi politik yang hanya berdasarkan etnis.

Akibatnya, meskipun identitas politik memiliki tempat dalam demokrasi, penerapannya yang berlebihan harus dihindari. NU dan masyarakat Indonesia pada umumnya perlu mampu membedakan antara penggunaan identitas sebagai alat konstruktif untuk mobilisasi politik dan sebagai senjata politik yang mengancam demokrasi dan keharmonisan sosial.

SIMPULAN

Sebagai kesimpulan, salah satu unsur yang memengaruhi dinamika politik di tubuh Nahdlatul Ulama (NU) adalah isyarat politik identitas yang dilontarkan Muhaimin Iskandar dalam situasi Pemilu 2024. Dalam upaya menggalang dukungan warga NU, Muhaimin Iskandar dengan tegas menyatakan bahwa dirinya adalah kader asli NU dan menegaskan bahwa mereka yang tidak mendukung pasangan Anies Baswedan dan dirinya (AMIN) dalam pemilu tampak mempertanyakan identitas NU mereka. Meskipun NU dan PKB tidak memiliki hubungan struktural formal dan merupakan lembaga yang berbeda menurut konstitusi, pernyataan ini memanfaatkan sentimen keagamaan dan hubungan historis yang erat antara kedua organisasi tersebut. Akan tetapi, Muhaimin Iskandar tidak mengambil pernyataan itu terlalu jauh atau memaksakan, sehingga tidak dapat diklasifikasikan sebagai politik identitas.

Meskipun politik identitas dapat menjadi alat yang berguna untuk menggalang dukungan, terdapat berbagai potensi terhadap keraguan dan ketidaksetujuan di kalangan warga NU. Mengingat adanya pejabat publik lain yang memiliki warisan NU, seperti Khofifah Indar Parawansa selaku Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muslimat Nahdlatul Ulama dan menjabat Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024, yang memilih untuk mendukung pasangan Prabowo-Gibran, tidak semua pemilih NU merasa terkekang oleh narasi identitas ini. Tuduhan yang dilontarkan Muhaimin, yang menimbulkan keraguan atas kesetiaan NU dari pihak-pihak yang menentang pasangan AMIN, telah membuat hubungan di antara basis pemilih NU menjadi tegang dan dapat memecah dukungan.

NU sebagai sebuah lembaga dan masyarakat yang lebih luas dapat sangat merugikan bila ketidakpastian ini tidak diatasi dan politisasi identitas keagamaan terus berlanjut. Jika dukungan politik menjadi terpolarisasi, NU yang secara historis dianggap sebagai organisasi moderat yang menjunjung tinggi kerukunan umat dapat berisiko mengalami perpecahan internal. Namun, jika politik identitas menguasai masyarakat, akan ada lebih banyak peluang untuk keresahan dan polarisasi sosial, yang dapat merusak sistem demokrasi yang sehat dan menyebabkan konflik yang parah antara berbagai kelompok.

Singkatnya, penggunaan identitas politik oleh Muhaimin Iskandar dapat meningkatkan basis dukungannya di antara anggota NU, tetapi juga akan memberikan kesulitan yang signifikan baginya

untuk menangani keraguan internal dan potensi efek negatif. Baik NU maupun masyarakat Indonesia pada umumnya perlu menyadari bahaya dari politik identitas dan berkonsentrasi pada cita-cita bersama dan isu-isu politik yang lebih substansial untuk menjaga stabilitas dan persatuan.

REFERENSI

- Abadi, M., Alung, C., Permadi, I., & Schova, Y. (2023). Strategi Mitigasi Dampak Negatif Politik Identitas Sebelum Dan Sesudah Pemilu. *Jakarta: Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 4(2).
- Andriyani, Lusi. (2011). *Buku Ajar Politik Identitas (Studi pada Partai yang berbasis Ideologi Agama, Nasionalis dan Pluralis)*. Cetakan 1. Umsida Press, UMSIDA. ISBN 978-979-3401-25-6
- Badan Pusat Statistik Kota Samarinda. (2024). "Agama di Indonesia, 2024" [Tabel Statistik]. Badan Pusat Statistik. Diakses pada 29 September 2024, melalui <https://samarindakota.bps.go.id/id/statistics-table/1/MzIOIzE=/agama-di-indonesia-2024.html>
- Dahl, Robert, A. (2001). *Perihal Demokrasi: Menjelajah Teori dan Praktek Demokrasi Secara Singkat*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Dani. (2024). "Cak Imin Ragukan 'ke-NU-an' Khofifah karena Dukung Prabowo". Cnnindonesia. Diakses pada 29 September 2024, melalui <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20240111181453-617-1048308/cak-imin-ragukan-ke-nu-an-khofifah-karena-dukung-prabowo>
- Diamond, Larry. (2003). *Developing Democracy: Toward Consolidation*. IRE Press, Yogyakarta.
- Jazuli, A. S. (2013). *Revitalisasi Politik Identitas di Indonesia*. Pusat Studi Inovasi Pemerintahan dan Kerjasama Antardaerah Prodi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Brawijaya.
- Haboddin, M. (2012). Menguatnya politik identitas di ranah lokal. *Jurnal Studi Pemerintahan*.
- Ikhsanudin, Arief. (2024). "Khofifah: Kata Ketum dan Sekjen PBNU, Ke-NU-an Saya Asli". Detiknews. Diakses pada 29 September 2024, melalui <https://news.detik.com/berita/d-7151017/khofifah-kata-ketum-dan-sekjen-pbnu-ke-nu-an-saya-asli>
- Kenny, Michele. (2004). *The Politics of Identity*. Cambridge, Polity Press.
- Mahatma, M. (2017). Paradigma Politik Nahdlatul Ulama (NU) dalam Bernegara. *Mawaizh: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 8(1), 31-54.
- Meyer, Thomas. (2004). *Politics of Identity: The Challenge of Modern Fundamentalism*. Federich Elbert Stiftung.
- Moeis, Isnarmi. (2014). Pendidikan Multikultural Transformatif: Integritas Moral, Dialogis dan Adil. *UNP Press Padang*.
- Pamungkas, S. (2009). *Perihal Pemilu*. Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada.
- Rambe, T., & Mayasari, S. (2022). Politik Identitas dan Krisis Identitas: Mengungkap Realitas Praktek Politik di Indonesia. *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial*, 8(1), 91-105.
- Rusmawan, U. (2019). *Teknik Penulisan Tugas Akhir dan Skripsi Pemrograman*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Sinambela, Narda Margaretha. (2024). "KPU Gelar Penetapan Pemenang Pilpres 2024 Pagi Ini". Antara. Diakses pada 29 September 2024, melalui <https://www.antaraneews.com/berita/4071861/kpu-gelar-penetapan-pemenang-pilpres-2024-pagi-ini>
- Slamet, A. (2019). Identitas Politik dalam Komunikasi Politik Calon Gubernur Jawa Barat Tahun 2018. *Linimasa: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(1).
- Soenjoto, W. P. P. (2019). Eksploitasi isu politik identitas terhadap identitas politik pada generasi milineal indonesia Supratikno, A. (2022). *Reviewing Identity Politics from Pancasila Democracy*. <https://doi.org/10.4108/eai.15-9-2021.2315573>.
- Surbakti, Ramlan. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta, PT. Gramedia.
- Takdir, M. (2017). Identifikasi Pola-Pola Konflik Agama dan Sosial (Studi Kasus Kekerasan Berbasis Sektarian dan Komunal di Indonesia). *Ri'ayah: Jurnal Sosial dan Keagamaan*, 2(01), 45-64.
- Ulya, Fika Nurul., dan Prabowo, Dani. (2023). "Mahfud Jelaskan Bedanya Identitas Politik dan Politik Identitas". Kompas.com. Diakses pada 29 September 2024, melalui

<https://nasional.kompas.com/read/2023/09/13/13221801/mahfud-jelaskan-bedanya-identitas-politik-dengan-politik-identitas>

Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Wutsqaa, Urwatul. (2023). "*Profil Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB yang Dampingi Anies di Pilpres 2024*". Detiksulsel. Diakses pada 30 September 2024, melalui <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-6994741/profil-muhaimin-iskandar-ketua-umum-pkb-yang-dampingi-anies-di-pilpres-2024>

Yulika, Nila Chrisna. (2024). "*Diragukan Cak Imin, Khofifah Tanya soal Ke-NU-annya ke Peserta Harlah Muslimat NU*". Liputan6. Diakses pada 30 September 2024, melalui <https://www.liputan6.com/news/read/5509748/diragukan-cak-imin-khofifah-tanya-soal-ke-nu-annya-ke-peserta-harlah-muslimat-nu?page=2>